
**MENGEVALUASI PERAN DESENTRALISASI FISKAL: ANALISIS TERHADAP
PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH**

Irmanelly ¹⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ¹⁾
irmanelly@umjambi.ac.id ¹⁾
Deka Veronica ²⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ²⁾
dekaveronica@umjambi.ac.id ²⁾
Yunie Rahayu ³⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ³⁾
yunie.rahayu@umjambi.ac.id ³⁾
Asrini ⁴⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ⁴⁾
asrini@umjambi.ac.id ⁴⁾
Mainita ⁵⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ⁵⁾
manita@umjambi.ac.id ⁵⁾
Sugma Dewi Apriyani ⁶⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi ⁶⁾
sugma.dewi.apriyani@umjambi.ac.id ⁶⁾

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi, dengan penurunan ketimpangan sering dijadikan indikator keberhasilan. Di Provinsi Jambi, perbedaan potensi sumber daya, demografi, dan pertumbuhan antar wilayah menyebabkan ketimpangan ini. Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal melalui UU No.33 Tahun 2004, meski efektivitasnya belum sepenuhnya terukur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, (2) mengevaluasi perannya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, (3) memetakan ketimpangan berdasarkan penerimaan daerah, dan (4) mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal.

Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data primer dan sekunder dari BPS, Bappeda, serta literatur terkait, mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 15 tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda, tipologi Klassen, cross-tabulation, dan SWOT.

Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam, infrastruktur, akses pendidikan, urbanisasi, dan kebijakan pemerintah. Secara simultan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, meskipun kontribusi DAU terhadap ketimpangan pembangunan tidak signifikan. Untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, investasi pendidikan, diversifikasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan inklusif. Penelitian ini

memberikan dasar evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Ketimpangan pendapatan.

PENDAHULUAN

Ketimpangan antar daerah tetap menjadi isu yang signifikan di berbagai negara, baik di negara maju, berkembang, maupun miskin (8). Ketimpangan merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi perbedaan ketimpangan pembangunan, penguasaan sumberdaya alam dan perbedaan sumberdaya yang dimiliki antar wilayah (7). Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut maka pemerintah telah menerapkan Sistem otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang desentralisasi fiskal menandai pelaksanaan desentralisasi keuangan. Proses ini ditandai dengan pengalihan sumber-sumber pendanaan kepada daerah serta pembentukan wilayah administratif baru (16).

Implementasi otonomi daerah atau desentralisasi fiskal ditandai dengan peningkatan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat serta pemekaran wilayah yang berkembang dari 6 kabupaten/kota pada tahun 2005 menjadi 11 kabupaten/kota pada tahun 2022. Otonomi daerah dianggap ideal apabila seluruh pengeluaran pemerintah daerah dapat dibiayai sepenuhnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)(3-5). Namun, kenyataannya, PAD hanya menyumbang porsi kecil terhadap total pendapatan daerah dan belum mampu menjadi sumber pendapatan utama. Kondisi ini justru memperburuk ketimpangan antar daerah dan bertentangan dengan tujuan utama otonomi daerah, yaitu pemerataan pembangunan (11).

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dan kesejahteraan penduduk antar wilayah meliputi indeks gini rasio dan PDRB per kapita di masing-masing wilayah(13-14). Semakin tinggi nilai indeks gini rasio, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Sebaliknya, semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan, mengingat

kebijakan ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan yang terukur terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan.

METODOLOGI

Metode Analisis

Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan eksploratif berbasis studi pustaka (library research). Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bappeda, serta Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan instansi terkait lainnya.

Alat Analisis Data

Alat Analisis Untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan studi kepustakaan yang didasarkan pada teori desentralisasi. Sedangkan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan dilgunakan Indeks Williamson (15). Dasar perhitungan dalam penelitian ini menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), yang diperoleh dengan membagi total PDRB ADHK suatu daerah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

$$CV_w = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

- Vw : Indeks Williamson
Yi : Pendapatan regional per kapita kabupaten/kota ke-i
Y : Pendapatan regional per kapita se provinsi
Fi : Jumlah penduduk di kabupaten/kota ke-i
n : Jumlah penduduk se provinsi

Dengan kriteria sebagai berikut:

ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson < 0,2

ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara 0,21 – 0,35

ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson > 0,35

Untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dilakukan dengan menggunakan spesifikasi model

ekonometrika yang mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian (15), sebagai berikut.

$$DPR = \beta_0 + \beta_1 DAUPK + \beta_2 DBHPK + \beta_3 DAKPK + \varepsilon$$

Keterangan :

DPR	: Disparitas Pendapatan Regional
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien
DAUPK	: Dana Alokasi Umum per kapita
DBHPK	: Dana Bagi Hasil per kapita
DAKPK	: Dana Alokasi Khusus per kapita
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
e	: Standar error

dan selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji F, uji t.

Untuk memetakan kondisi desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan model Tipologi Klassen, yang dikembangkan dengan menggunakan indikator desentralisasi fiskal sebagai proxy pertumbuhan ekonomi dan Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) sebagai proxy pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah (2)(9-10).

Tabel 1
Tipologi Klassen untuk Pengidentifikasi Daerah Tertinggal

Tingkat penerimaan (DAU+DBH+DAK) kabupaten/kota dibandingkan rata-rata kabupaten/kota	Tingkat Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) kabupaten/kota dibandingkan rata-rata kabupaten/kota	
	Tinggi (>1)	Rendah (<1)
Tinggi (>1)	Kuadran I	Kuadran II
Rendah (<1)	Kuadran III	Kuadran IV

Sumber: Hasil Modifikasi

Model ini membandingkan penerimaan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/PKPD (DAU+DBH+DAK) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan tingkat penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan selanjutnya kelompokkan berdasarkan empat kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I adalah Kabupaten/Kota Maju dan Cepat Tumbuh
2. Kuadran II adalah Kabupaten/Kota Maju tetapi Tertekan

-
3. Kuadran III adalah Kabupaten/Kota yang Berkembang Cepat
 4. Kuadran IV adalah Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal

Selanjutnya dilakukan analisis Cross Tabulation untuk memetakan korelasi antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan. Dan untuk menganalisis strategi untuk meningkatkan peran desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan digunakan analisis model SWOT.

HASIL

A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Penelitian ini menggunakan metode analisis ketimpangan pendapatan regional dengan pendekatan Indeks Williamson. Dalam analisis statistik, Indeks Williamson merupakan bentuk *coefficient of variation* yang umum digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan atau disparitas. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi keberadaan ketimpangan regional, dalam hal ini di wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Indeks Williamson, ditemukan bahwa selama periode 2011–2023, pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi berada pada rentang nilai 0,35 hingga 0,5. Nilai-nilai ini menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya dan mencerminkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah ini tergolong sedang, dengan rata-rata nilai Korelasi Pearson sebesar 0,395. Ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2020, sedangkan ketimpangan tertinggi tercatat pada tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Perbedaan Kemampuan Daerah dan Sumber Daya Alam

Ketimpangan antar wilayah terkait erat dengan perbedaan dalam penguasaan sumber daya alam dan distribusi penduduk, yang memengaruhi nilai tambah bruto (PDRB). Kabupaten seperti Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, dan Kota Jambi memiliki sumber daya migas, sementara kabupaten lainnya tidak. Produksi migas yang sulit diprediksi dan harga yang fluktuatif turut memengaruhi nilai tambah migas serta PDRB ADHB daerah penghasil migas.

2. Penyerapan Investasi dan Infrastruktur

Tingkat penyerapan investasi yang berbeda-beda serta kesenjangan infrastruktur memengaruhi disparitas pendapatan (6)(12). Tingginya pendapatan per kapita di beberapa wilayah sering kali disebabkan oleh tingginya tingkat investasi yang masuk, sementara daerah lain mungkin tertinggal karena infrastruktur yang kurang memadai.

3. Akses ke Pasar

Kabupaten/kota dengan akses yang lebih baik ke pasar domestik dan internasional cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi karena mampu menjual produk dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.

4. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Daerah yang lebih maju dalam adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

5. Efektivitas Implementasi Program Pemerintah

Variasi dalam keberhasilan implementasi program pembangunan oleh pemerintah daerah juga menjadi penyebab ketimpangan. Daerah yang lebih efektif dalam memanfaatkan program pemerintah cenderung memiliki peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih signifikan.

6. Pembangunan Infrastruktur

Perbedaan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan listrik, berdampak langsung pada tingkat aktivitas ekonomi dan aksesibilitas. Daerah dengan infrastruktur yang lebih baik lebih menarik bagi investor dan bisnis, yang meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

7. Akses ke Pendidikan dan Kesehatan

Kabupaten/kota dengan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih produktif, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

8. Pendidikan dan Pelatihan

Wilayah yang menyediakan akses lebih baik ke pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan menghasilkan tenaga kerja yang lebih

kompeten dan produktif, yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.

9. Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja

Daerah yang fokus pada penyelenggaraan program pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja cenderung memiliki angkatan kerja yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2
Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2011–2022

Tahun	Indeks Williamson
2011	0,415
2012	0,419
2013	0,417
2014	0,416
2015	0,408
2016	0,402
2017	0,410
2018	0,361
2019	0,362
2020	0,357
2021	0,398
2022	0,423
2023	0,343
Rata-rata	0,395

Sumber: Data diolah

B. Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan

Estimasi model pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan diberikan pada Tabel berikut :

Tabel 3
Estimasi Model Ketimpangan Pembangunan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
C	.364	.006		63.360	.000
DAU	5.425E-9	.000	.084	.364	.722
DAK	2.112E-8	.000	.036	.263	.797
DBH	8.638E-8	.000	.819	3.640	.003
R Square	0,894				

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,955 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen,

yaitu ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,800 mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, ketiga sumber dana tersebut mampu menjelaskan sebesar 80 persen varians dari ketimpangan pembangunan. Sementara itu, sisanya sebesar 20 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai t hitung sebesar 0,364 dengan tingkat signifikansi 0,722 yang lebih besar dari $\alpha = 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi. Demikian pula, pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai t hitung yang diperoleh adalah 0,263 dengan tingkat signifikansi 0,797, yang juga lebih besar dari $\alpha = 0,1$. Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH), diperoleh nilai t hitung sebesar 3,640 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.

Untuk mencari hubungan langsung dan tidak langsung atau pengaruh variabel variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung matriks korelasi dari masing-masing variabel. Hasil perhitungan korelasi antar variabel diberikan pada tabel 6 berikut:

C. Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan

Berdasarkan analisis maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6.
Korelasi antar sub variabel

	DAU	DAK	DBH	IW
DAU	1,000	0,256	0,814	0,760
DAK	0,256	1,000	0,127	0,161
DBH	0,814	0,127	1,000	0,892
IW	0,760	0,161	0,892	1,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian korelasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,256 menunjukkan hubungan

yang rendah dan positif antara DAU dengan DAK. Artinya, meskipun ada hubungan positif, kekuatan hubungan ini tergolong lemah.

- Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Bagi Hasil (DBH): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,814 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara DAU dengan DBH. Ini mengindikasikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat dan signifikan.
- Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,760 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara DAU dengan ketimpangan pembangunan. Hal ini berarti peningkatan DAU dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pembangunan.
- Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Dana Bagi Hasil (DBH): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,127 menunjukkan hubungan yang rendah dan positif antara DAK dengan DBH. Hubungan ini cenderung lemah, dengan pengaruh yang tidak begitu signifikan.
- Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,161, menunjukkan hubungan yang sangat rendah dan positif antara DAK dengan ketimpangan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh DAK terhadap ketimpangan pembangunan relatif kecil.
- Hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,892, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara DBH dengan ketimpangan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam DBH memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Kerangka Hubungan Kausal

Dana Alokasi Umum (DAU), yang diukur melalui ketimpangan pembangunan (IW), menunjukkan kontribusi positif meskipun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Dengan kata lain, variabilitas ketimpangan pembangunan dapat dijelaskan oleh keberadaan DAU. Secara langsung, kontribusi DAU terhadap ketimpangan pembangunan tercatat sebesar 0,71%, yang dihitung

berdasarkan $(0,084)^2 = 0,71\%$. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), yang juga diukur dengan ketimpangan pembangunan (IW), memberikan kontribusi positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Kontribusi langsung DAK terhadap ketimpangan pembangunan hanya mencapai 0,13%, yang dihitung melalui $(0,036)^2 = 0,13\%$. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Berdasarkan perhitungan, kontribusi langsung DBH terhadap ketimpangan pembangunan sebesar 67,08%, yang dihitung melalui $(0,819)^2 = 67,08\%$.

Strategi Untuk Meningkatkan Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Tabel 7
Matriks SWOT

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> Profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia Komitmen serta tanggung jawab yang jelas dari pemerintah pusat Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mendukung pengelolaan Dana Perimbangan Efektivitas dalam perimbangan Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan dan pengembangan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di tingkat pemerintah pusat 	<ol style="list-style-type: none"> Kerja sama dan sinergi antar instansi pusat masih belum maksimal Sistem informasi dan teknologi yang ada belum berfungsi secara optimal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada masih kurang memadai Terbatasnya kemampuan keuangan negara Proses monitoring dan evaluasi yang kurang optimal
Peluang (O)	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota dalam pengelolaan Dana Perimbangan Koordinasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas Dana Perimbangan (S1, S2, S3, O1, O2, O3, O4) Penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (S3, O3)

3. Peraturan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan Dana Perimbangan di tingkat daerah 4. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang efektif dalam pengelolaan Dana Perimbangan di daerah 5. Sosialisasi serta bimbingan teknis untuk pengelola Dana Perimbangan di daerah		
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Sistem informasi dan teknologi di tingkat daerah masih belum optimal 2. Pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme serta pengelolaan Dana Perimbangan perlu ditingkatkan 3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas 4. Pemanfaatan Dana Perimbangan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah masih belum maksimal 5. Penambahan jumlah kabupaten/kota akibat pemekaran wilayah baru	1. Peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah (S1, S5, T2)	1. Pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah (W4, T3, T4) 2. Implementasi integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat (W2, T1) 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan (W5, T4)

KESIMPULAN

1. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk perbedaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, investasi, urbanisasi, struktur ekonomi, akses pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan peningkatan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk diversifikasi ekonomi, dan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif di seluruh wilayah provinsi.
2. Secara simultan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,800 menunjukkan bahwa ketiga jenis dana tersebut secara kolektif dapat menjelaskan 80 persen variabilitas ketimpangan pembangunan. Sementara itu, sisanya sebesar 20 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

3. Dana Alokasi Umum (DAU), yang diukur melalui ketimpangan pembangunan (IW), menunjukkan kontribusi positif meskipun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Dengan demikian, variabilitas ketimpangan pembangunan sebagian besar dapat dijelaskan oleh keberadaan Dana Alokasi Umum.
4. Mengurangi ketimpangan pendapatan melalui desentralisasi fiskal memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengalokasikan dana secara adil, mengembangkan infrastruktur, memberdayakan ekonomi lokal, memastikan transparansi dan akuntabilitas, menerapkan kebijakan inklusif, dan mendorong kerjasama antar daerah, desentralisasi fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan:

1. Penggunaan Indikator Kinerja
 - Indikator Kinerja Keuangan: Menggunakan indikator seperti rasio PAD terhadap total pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan tingkat serapan anggaran untuk menilai kinerja keuangan daerah.
 - Indikator Ketimpangan Pendapatan: Menggunakan indikator ketimpangan seperti koefisien Gini, rasio pendapatan antara kuintil atas dan bawah, dan Indeks Ketimpangan Wilayah.
2. Evaluasi Dampak Kebijakan
 - Dampak pada Pembangunan Ekonomi: Mengevaluasi bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi potensial.
 - Dampak pada Kesejahteraan Sosial: Mengevaluasi dampak desentralisasi

fiskal terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

- Dampak pada Ketimpangan Regional: Mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan antar daerah.

3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- Partisipasi Masyarakat: Menggunakan survei, wawancara, dan forum diskusi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang persepsi mereka terhadap desentralisasi fiskal dan dampaknya pada kesejahteraan mereka.
- Konsultasi dengan Pemerintah Daerah: Melibatkan pemerintah daerah dalam proses evaluasi untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan keberhasilan yang mereka alami.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

- Sistem Monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang berkelanjutan untuk terus memantau pelaksanaan desentralisasi fiskal dan dampaknya pada ketimpangan pendapatan.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang, R. I. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Anggono P. The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 2020;6(2).
3. Indonesia R. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun. 2005;140.
4. Indonesia P. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2002.
5. Indonesia R. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.
6. Tetya O. Analisis Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Doctoral dissertation, Tesis. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia). 2010.

7. Arsyad L. Ekonomi Pembangunan. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta. 2010.
8. Wardhana A. Juanda B. Siregar H. Wibowo K. Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*. 2013;15(2), 111-118.
9. Basri S. Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 2012;20(04).
10. Nurman MA. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-200. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 2013;9(1), 1-20.
11. Adlina HR. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010-2017.
12. Efriza U. Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 2014.
13. Neda IG. Mohammed S. The tradeoff between growth and financial equality in financial decentralization policies (the case study of Iran). *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)* ISSN 2356-5926. 2016;1(1), 1256-1267.
14. Mudayen YMV. Maridjo H. The impacts of fiscal decentralization, institutional transformation, and regional revenue on income disparities between provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*. 2018;20(3), 247-259.
15. Juanda B. Junaidi. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. IPB. Press. Bogor. 2012.
16. Sidig DS. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. 2018;1(1), 978-100.
17. Desmaryani, S., Soleh, A., & Wiarta, I. (2024). Integration of technology acceptance models and government support to improve digital literacy. *Heliyon*, 10(14).
18. Soleh, A., Daniel, P. A., Tamtomo, H., & Rahayu, Y. (2022). Strategi dan Peran Muhamdiyah dalam Membantu Transformasi Peradaban Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. *Kontekstualita*, 37(1), 69-78.
19. Musnaini, M., Suryani, L., Irsyad, M., Asrini, A., & Ketut Mudhita, I. (2022). Performance analysis of local brand organic cosmetics marketing as an effort to develop the Jambi regional economy. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10(4), 1-20.
20. Herlin, F., Zamzami, Z., Safri, M., & Syahmardi, Y. (2022). Improvement strategy for regional financial performance affecting macroeconomics in regency/city in Jambi province. *International Journal of Research in Business & Social Science*, 11(8), 401-408.

-
21. Hidayat, M. S., & Herlin, F. (2019). Fiscal decentralization and its impact on industrial development in Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 297-304.
 22. Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90.
 23. Irmanelly, I., Amir, A., Zamzami, Z., & Syaparuddin, S. (2022). Economic growth inclusivity in Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 105-113.
 24. Hidayat, A. M., Hadiyanto, F., Irmanelly, I. M., & Soleh, A. (2021). THE EFFECT OF EXCHANGE RATES ON FOREIGN DEBT AND ITS IMPACT ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH. *Rigeo*, 11(10).
 25. Ridwansyah, M., Desmaryani, S., Irmanelly, I., Musnaini, M., Suman, A., & Fazri, A. (2024). Identifikasi Dan Strategi Pengembangan Potensi Sub Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Baru Di Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 16(1), 39-50.
 26. Yuvanda, S., & Hidayat, M. S. (2022). Strategy in developing priority craft industry by using SAWSWOT Model in Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10(5), 287-296.
 27. Yuvanda, S., Zamzami, Z., & Safri, M. (2020). Development on the leading small and medium-sized industry (SMI): food industry in Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 311-318.
 28. Rosita, R., Haryadi, H., & Amril, A. (2014). Determinan Eksport CPO Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(4), 183-183.